

## Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Moderat Dalam Beragama: Studi Kasus Masyarakat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abdul Qoyum<sup>1</sup>, Misbahul Munir<sup>2</sup>, Uum Munawaroh<sup>3</sup>, Fahmy Akbar Idries<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: [abdul.qoyum@uin-suka.ac.id](mailto:abdul.qoyum@uin-suka.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, email: [misbahul@ubb.ac.id](mailto:misbahul@ubb.ac.id)

<sup>3</sup>STIM YKPN Yogyakarta, email: [uum.e.munawaroh@gmail.com](mailto:uum.e.munawaroh@gmail.com)

<sup>4</sup>UNU, Yogyakarta

---

**Abstrak:** Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua hal penting yang dianggap memiliki pengaruh terhadap cara pandang dan sikap seseorang dalam hubungan sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan dan Pendidikan terhadap sikap moderat dalam beragama seseorang. Penelitian menggunakan sampel 390 responden yang berasal dari 114 kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul, dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan pada pengujian statistic, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara faktor kemiskinan dengan sikap moderat seseorang dalam beragama. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka akan semakin rendah sikap moderasi beragama seseorang. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap moderat. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan faktor kemiskinan untuk memperbaiki sikap moderat dalam beragama suatu masyarakat.

**Kata Kunci:** Kemiskinan; Pendidikan; Moderat dalam Beragama; Moderasi Beragama.

**Abstract:** Poverty and education are two important things that are considered to have an influence on a person's perspective and attitude in social relations. This study aims to find out how the effect of poverty and education on moderate attitudes in a person's religion. The study used a sample of 390 respondents from 114 villages in Gunung Kidul Regency, using a questionnaire. Based on statistical testing, this research proves that there is a negative relationship between poverty and a moderate attitude of a person in religion. It means that, the higher the level of poverty, the lower the attitude of one's religious moderation. Furthermore, this research also proves that the education factor does not significantly affect moderate attitudes. Therefore, this study suggests for the government to improve the economic condition, if they want to improve the moderate attitude of the society.

**Keywords:** Poverty; Education; Moderate in religion; religious moderation.

---

### 1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang diderita oleh hampir semua negara berkembang (Mandey et al., 2023; Saragih et al., 2022). Masalah kemiskinan bersifat multidimensi yang imbasnya tidak hanya pada aspek ekonomi semata, akan tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, sosial, budaya yang ada pada masyarakat (Aprianto, 2018; Rahman & Firman, 2019). Dalam konteks Indonesia, meskipun dalam beberapa dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan lambat laun

mengalami penurunan, namun pada kenyataannya masih ada jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terlebih, kemiskinan yang ada di Indonesia bersifat struktural (Ardiansyah et al., 2019; Pratiwi et al., 2022). Artinya, kemiskinan tidak hanya berfokus pada masalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Lebih dari itu, masalah kemiskinan juga berasal dari ketidakmerataan dalam mendapatkan akses sumberdaya, timpangnya akses pendidikan dan kesehatan antar penduduk, sulitnya kesempatan kerja bagi masyarakat kelas bawah dan juga terkadang dipengaruhi oleh faktor budaya. Faktor budaya yang lebih menerima apa adanya tanpa ada usaha untuk memperbaiki kondisi hidup.

Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah timpangnya infrastruktur antar wilayah (Sabar et al., 2022; Septiadi & Nursan, 2020). Salah satu yang paling mencolok adalah perbedaan antara wilayah kota dan desa. Di kota, segala sesuatu ada dengan infrastruktur yang baik. Sebaliknya, di desa masih banyak ditemui kurangnya infrastruktur yang memadai sebagaimana di kota (Khusaini et al., 2020; Panggarti et al., 2022). Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa kantong-kantong kemiskinan banyak berada di desa. Belum lagi bicara antar daerah, misal daerah Jawa dan luar Jawa. Pasti sangat berbeda jauh ketimpangan infrastrukturnya.

Wilayah yang pembangunan infrastruktur tidak memadai pada umumnya juga memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini menjadikan sumberdaya manusia di wilayah tersebut menjadi rendah. Dengan kata lain, tingkat pendidikannya juga pasti rendah. Padahal, salah satu senjata ampuh dalam memutus lingkaran setan kemiskinan adalah dari aspek pendidikan (Direja & Paramitasari, 2022; Khusaini et al., 2020; Setiani et al., 2023).

Pendidikan adalah harapan bagi para penduduk miskin. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, semakin besar pula harapan untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak, terhormat dan pendapatan tinggi. Dengan kata lain, pendidikan memberikan harapan bagi mereka untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik (Rizal, 2015). Masyarakat kelas menengah bawah sering kali mengalami hambatan dalam mengejar pendidikan. Hal ini karena adanya keterbatasan biaya. Terkadang biaya sudah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk pendidikan anak terabaikan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menghambat pendidikan anak dari kelompok rentan dan miskin. Belum lagi, dalam kasus tertentu, di wilayah pinggiran misalnya, adanya keterbatasan fasilitas pendidikan juga menjadi masalah tersendiri dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat miskin. Kondisi miskin dan berpendidikan rendah, cenderung rawan terhadap berbagai ajaran dan faham tertentu. Terkadang kondisi demikian dimanfaatkan oleh kelompok penyebar faham-faham ekstrim keagamaan tertentu. Dengan demikian, perlu adanya sikap moderasi dalam beragama (Sihidi, 2020).

Sikap moderasi dalam beragama merupakan sikap yang mengedepankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan menolak paham atau ajaran-ajaran yang bersifat ekstrem. Sebagai negara dengan penduduk muslim, Indonesia tentu mempunyai adat ketimuran di mana lebih mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, memupuk keharmonisan sosial

dan kerukunan antar umat beragama. Namun di sisi yang lain, juga harus berhati-hati dengan berbagai ajaran ekstrim yang mengatasnamakan agama.

Kelompok rentan miskin dan berpendidikan rendah merupakan sasaran atau target bagi kelompok ekstrem. Hal ini didasari oleh kondisi kehidupan baik kehidupan secara pribadi maupun keluarga yang tidak stabil, mudah dipengaruhi oleh orang lain atau bahkan sudah terlanjur kecewa dengan nasib hidup. Perlu ada penguatan sikap dalam moderasi beragama bagi kelompok rentan miskin dan berpendidikan rendah. Dalam konteks Indonesia, ideologi Pancasila menjadi *way of life* dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia (Billyam et al., 2018; Hutabarat et al., 2022; Lumintang et al., 2023; Nafisah, 2023; Yanto, 2016). Cara hidup pancasila bisa direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya dalam aspek ekonomi, yang kemudian disebut dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, dengan berbagai gagasan tentang keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan juga pemerataan distribusi sumber daya (Pattipeilohy et al., 2023; Suhardin, 2023), bisa menjadi oase bagi permasalahan yang ada, terutama ihwal kelompok rentan miskin, pendidikan rendah dan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan.

Studi ini secara empirik mengkaji mengenai peranan ekonomi Pancasila dalam mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan dan moderasi kehidupan beragama. Studi ini dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Lokus tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok rentan miskin yang tinggi, pendidikan rendah sehingga perlu adanya penguatan moderasi beragama serta bagaimana gagasan ekonomi Pancasila ditawarkan.

## 2. Literatur Review

Kemiskinan dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mempunyai akses terhadap sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan secara layak (Aprianto, 2018; Rahman & Firman, 2019; Zahara et al., 2023). Dalam sudut pandang yang lebih luas lagi, kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi (Fitriani et al., 2022; Maisaroh & Rohman, 2022; Mardikanto, 2019; Septiadi & Nursan, 2020). Artinya kemiskinan tidak hanya sebatas pada masalah kurangnya terhadap kebutuhan ekonomi, tetapi bahkan merasa tidak aman atau rentan akan suatu kondisi, bisa dikategorikan sebagai kemiskinan.

Jika ditinjau dalam pembahasan yang lebih sempit lagi, terkadang kemiskinan diukur semata pada sektor moneter saja. Artinya, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya seseorang dalam mengakses sumber daya secara ekonomi saja. Bank Dunia (*world bank*) misalnya, mendefinisikan kemiskinan jika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah 1,9 dollar per hari. Sedangkan dalam konteks Indonesia, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidup baik yang sifatnya makanan maupun non makanan. Dalam ukuran moneter, masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai miskin jika tidak mampu mencukupi kebutuhan 2100 kalori dalam kebutuhan minuman dan makanan per kapita. Dalam kacamata ekonomi pembangunan, kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkap pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak

keterbatasan akses dalam pekerjaan, dan juga ketidakmerataan pada sektor pembangunan antar wilayah.

Dalam teori kemiskinan struktural, kemiskinan terjadi disebabkan oleh kondisi struktur sosial dan ekonomi yang penuh dengan ketidak-adilan. Sumberdaya dalam ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elite. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan akses sumberdaya menjadi sangat terbatas. Dengan kondisi yang sangat tidak menguntungkan tersebut, sampai muncul istilah “budaya miskin” (Fadilla, 2018; Iqbal, 2023). Istilah tersebut mengacu pada kondisi kemiskinan yang diteruskan antargenerasi secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok atau komunitas miskin tersebut.

Dalam tulisan Mardiansah (2023) menyebutkan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi tingkat seseorang atau kelompok adalah rendahnya pendidikan. Dalam kondisi normal, pada umumnya, wilayah dengan pendidikan rendah maka angka kemiskinannya tinggi. Pendidikan diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk memperoleh pengetahuan, skill, keterampilan, nilai, norma, sikap yang mengarah pada pengembangan individu ke arah yang lebih baik secara optimal. Pemenuhan terhadap pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan UNESCO (2005) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi semua individu yang hidup di bumi.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif. Penelitian ini mengambil kasus masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dan dengan IPM yang di sisi lain tergolong cukup baik. Sampel penelitian ini berjumlah 390 dari 114 Desa di Kabupaten Gunung Kidul, dimana 276 warga diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 114 warga lainnya adalah Perempuan. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke lapangan secara langsung. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan logistic regression, dengan alat bantu perangkat lunak STATA.

### **4. Temuan dan Analisis**

#### **4.1. Statistik Deskriptif**

Tabel 1 menjelaskan tentang statistika deskriptif dari sampel penelitian ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel moderasi 1 yang menjelaskan sikap masyarakat terkait dengan keberadaan masyarakat yang berbeda agama, memiliki rata-rata skor 0.656. Artinya dari aspek ini masyarakat menyatakan tidak ada masalah andai ada masyarakat yang berbeda agama. Namun demikian jika kita lihat di skor moderasi 2 (sikap terkait pendirian rumah ibadah beda agama), rata-ratanya adalah 2,336. Skor ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat menyatakan tidak setuju terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tersebut.

Tabel 1. Statistik Diskriptif

	count	mean	sd	min	max	sum
Moderasi1	390	0,656	0,476	0,000	1,000	256,000
Moderasi2	390	2,336	0,726	1,000	4,000	911,000
Kemiskinan1	390	0,103	0,304	0,000	1,000	40,000
Kemiskinan2	390	0,387	0,488	0,000	1,000	151,000
Tingkat Pendidikan	390	3,428	1,122	1,000	6,000	1337,000
GKMakanan	390	1.099.715,38	696.320,224	40.000,000	5.600.000,000	4.289e+08
GK <sub>n</sub> Makanan	390	2.640.725,63	2.562,963,27	288.000,000	24,427,000,000	1.030e+09
GK	390	3.740.441,02	2.829.437,79	605.000,000	28.427.000,00	1.459e+09
Pendapatan	390	2,233	1,302	1,000	9,000	871,000
Pria	390	0,708	0,455	0,000	1,000	276,000

Catatan: variabel Moderasi1 = 1 jika setuju di lingkungan sekitar ada warga non-muslim, dan bernilai 0 jika sebaliknya. Variabel Moderasi 2 mengukur setuju atau tidaknya jika di lingkungan sekitar dibangun tempat ibadah non-muslim (1=sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=setuju; 4=sangat setuju). Variabel Kemiskinan = 1 jika GKMakanan <Rp408.522,-/kapita/bulan, dan 0 untuk sebaliknya; variabel Kemiskinan2 = 1 jika GK <Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan, dan 0 jika sebaliknya. Variabel GKMakanan mengukur jumlah pengeluaran atau pembelian pangan/rumah tangga/bulan. Variabel GK<sub>n</sub>Makanan mengukur jumlah pengeluaran atau pembelian bukan makanan/rumah tangga/bulan. Variabel GK mengukur jumlah pengeluaran atau pembelian makanan dan bukan makanan/rumah tangga/bulan. Tingkat pendidikan menunjukkan status pendidikan responden dengan kategori 1=TS; 2 =SD; 3=SMP; 4=SMA; 5=DIPLOMA; dan 6=S1/DIV. Variabel Pendapatan mengukur tingkat pendapatan responden/bulan dengan kategori 1 jika pendapatan <=1 juta; 2 jika pendapatan Rp1.001.000-2.500.000; 3 jika pendapatan Rp2..501.000-5.000.000; 4 jika pendapatan Rp5.001.000-7.500.000; 5 jika pendapatan Rp7.501-10.000.000; 6 jika pendapatan Rp10.001.000-12.501.000; 7 jika pendapatan Rp12.501.000-15.000.000; 8 jika pendapatan Rp17.501.000-

20.000.000; dan 9 jika pendapatan >Rp20.000.000. Terakhir variabel Pria menunjukkan nilai 1 jika responden berjenis kelamin laki-laki dan 0 jika responden Perempuan.

Sementara untuk variabel kemiskinan yang ditunjukkan dengan Kemiskinan1 dan Kemiskinan2 menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Kawasan Kabupaten Gunung Kidul masih berada di bawah garis kemiskinan (0,103 dan 0,387). Untuk variabel Pendidikan, tabel 1 juga menunjukkan bahwa mayoritas warga Gunung Kidul telah lulus SMA. Tabel 2 menggambarkan hubungan korelasi antar variabel.

Tabel 2. Koefisien Korelasi

	Moderasi1	Moderasi2	Kemiskinan1	Kemiskinan2	Tingkat Pendidikan	Pendapatan	Pria
Moderasi1	1						
Moderasi2	0.276***	1					
Kemiskinan1	0.0666	0.00658	1				
Kemiskinan2	-0.0789	0.0311	0.217***	1			
Tingkat Pendidikan	0.0163	-0.0508	-0.0764	-0.200***	1		
Pendapatan	-0.0321	0.0338	-0.0996*	-0.288***	0.144**	1	
Pria	0.0811	0.0178	0.0686	0.0595	0.0142	0.0329	1

Catatan: \*  $p < 0.05$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*\*\*  $p < 0.001$

Dalam pandangan teori fungsionalisme, pendidikan dipandang sebagai cara terbaik untuk menjaga kestabilan sosial dalam kelangsungan hidup. Institusi pendidikan dianggap sebagai institusi terhormat karena mengajarkan norma atau nilai-nilai hidup yang mempunyai peran dalam membangun sistem tatanan sosial di masyarakat. Lebih dari itu, institusi pendidikan juga dianggap sebagai tempat penggemblengan individu yang mampu mengasah keterampilan dan skill seseorang. Bahkan Emile Durkheim dalam pandangannya secara jelas menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan individu dalam masyarakat luas (Febriani & Fauzi, 2021; Nurus & Harianto, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Nasional. Dalam pembahasan yang lebih dalam, pendidikan merupakan instrumen vital dalam membangun bangsa atau negara, termasuk di dalamnya adalah sebagai pilar penting pengentasan kemiskinan. Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan keterampilan yang dapat memperbaiki kualitas hidup dan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial. Lebih jauh lagi, pendidikan juga bisa menjadi penangkal terhadap ajaran-ajaran ekstrem. Ajaran ekstrim tersebut yang pada umumnya menargetkan kelompok rentan miskin dan berpendidikan rendah.

**Tabel 3. Regresi Logistik (Logit)**

	Moderasi1	
	(1)	(2)
Kemiskinan1	0.401 (1.03)	
Kemiskinan2		-0.425 (-1.87) *
Pendidikan - SD	0.274 (0.34)	0.278 (0.35)
Pendidikan - SMP	0.144 (0.18)	0.031 (0.04)
Pendidikan - SMA	0.558 (0.71)	0.443 (0.56)
Pendidikan - S1/DIV	-0.102 (-0.12)	-0.325 (-0.38)
Pria	0.356 (1.52)	0.403 (1.71)
<i>Constanta</i>	0.032 (0.04)	0.304 (0.39)
N-Obs.	384	384
Pseudo R2	0.0162	0.0209

Catatan: Nilai di dalam kurung adalah nilai statistik z. \*  $p < 0.1$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$

Dengan pendidikan, penguatan akan moderasi beragama bisa dipupuk secara maksimal. Sikap moderat merujuk pada sikap atau pandangan seseorang yang bisa menghargai perbedaan dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah perbedaan dalam urusan agama. Hal yang perlu ditonjolkan dalam moderasi bukanlah membesar-besarkan perbedaan, melainkan sikap saling

menghargai, toleransi, keseimbangan dan kebersamaan. Bahkan dalam konteks ajaran Islam, sikap moderat (*wasatiyyah*) merupakan ajaran yang dianjurkan dalam Alquran dan Hadist. Dengan demikian, jika benar-benar mengerti akan esensi beragama, pasti akan menolak tindakan-tindakan kekerasan, ekstremisme, radikalisme dan fanatisme akan kelompok atau golongan secara berlebihan.

Dalam teori identitas sosial, (Nugraha et al., 2020; Saloom, 2012; Saputra, 2021) sikap setiap individu terhadap individu atau kelompok lain, dipengaruhi oleh identitas sosial yang melekat pada individu tersebut. Dengan kata lain, jika individu tersebut hidup pada komunitas atau kelompok sosial yang moderat, maka ia juga akan mempunyai sikap atau pandangan yang moderat. Begitu sebaliknya, jika individu tersebut hidup dalam lingkungan yang intoleran, besar kemungkinan ia juga akan mempunyai pandangan intoleran terhadap perbedaan yang ada di sekelilingnya. Individu cenderung mengikuti norma yang berkembang di sekitarnya.

Sikap moderat dalam beragama sangat dianjurkan dalam konteks kehidupan kebangsaan. Terlebih menjaga keamanan dan keharmonisan juga merupakan kewajiban bagi setiap individu yang hidup di suatu negara. Dengan bersikap moderat, setidaknya mampu mengurangi konflik dan perpecahan yang terjadi. Dialog antar umat beragama perlu digalakkan untuk mencapai keharmonisan dan keserasian hidup beragama. Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, jangan sampai terjebak pada permasalahan intoleransi beragama. Apalagi, mempertentangkan antara konsep negara dan agama, atau juga konsep budaya dan agama. Sikap moderat dalam beragama perlu dikuatkan secara berkelanjutan agar keserasian antara agama dan budaya di Indonesia tetap terjaga.

Tabel 3. di atas menjelaskan hasil uji statistic dari peneliti ini. Berdasarkan pengujian empiris, dengan menggunakan STATA, dari 2 faktor utama yang kami ajukan yaitu Pendidikan dan Kemiskinan, penelitian ini menemukan bahwa sikap moderat dalam beragama seseorang dipengaruhi oleh Faktor Kemiskinan. Dalam pengujian yang kami lakukan, faktor kemiskinan secara signifikan mempengaruhi sikap moderasi beragama seseorang. Hal ini terlihat dari koefisien  $-0.425 (-1.87)^*$ . Ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan seseorang maka sikap moderat akan semakin berkurang.

Hal ini bermakna bahwa negara perlu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, jika ingin menaikkan level sikap moderat dari masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks ini, sistem ekonomi Pancasila bisa mengambil peran dalam permasalahan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta memoderasi dalam kehidupan beragama. Ekonomi Pancasila merupakan konsep sistem perekonomian yang didasari oleh ideologi Pancasila (Agussalim et al., 2023; Septiani, 2022). Dalam sistem ekonomi Pancasila, lebih menekankan pada ranah keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan pemerataan pembangunan dan sumberdaya. Konsep ini dalam tataran teoritis dinilai yang paling cocok dalam konteks Indonesia, di mana di dalamnya berusaha membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Dalam pandangan Emil Salim, Ekonomi Pancasila bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: 1) koperasi sebagai soko guru ekonomi, 2) adanya peran negara yang dominan dalam mengatur jalannya perekonomian, serta 3) masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam pengaturan masalah ekonomi (Nugroho, 2011; Rahardjo, 2014; Rahardjo, 2016). Dengan demikian, dalam tataran



teoritis, sistem ini dipandang ideal dalam mengatasi masalah yang ada seperti kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan dan distribusi sumberdaya serta rendahnya tingkat pendidikan.

Dengan konsep koperasi misalnya, sebagai salah satu tawaran dari sistem ekonomi Pancasila, di mana sumberdaya dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Sehingga bisa dinikmati secara bersama dan tidak ada yang diuntungkan secara berlebihan. Dengan menguatkan sumberdaya lokal akan mampu menciptakan pekerjaan yang lebih banyak yang pada akhirnya akan turut serta mengurangi angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang ada pada sistem ekonomi Pancasila seperti konsep kesejahteraan bersama, keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dan sumberdaya bisa dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi berbagai masalah bangsa seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan serta ketidak-adilan sosial. Implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dapat menjadi kebijakan utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan tingkat pendidikan serta turut serta dalam menyebarkan ajaran moderasi dalam kehidupan beragama.

## **5. Kesimpulan**

Studi ini mengkaji mengenai tinjauan empirik pengaruh kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap sikap moderat dalam beragama. Secara umum, kesimpulan yang didapatkan dari studi ini adalah faktor kemiskinan secara signifikan berpengaruh terhadap sikap moderasi beragama seseorang, dan hubungannya negatif. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kemiskinan seseorang, maka sikap moderatnya semakin berkurang. Sedangkan untuk faktor pendidikan, hasil studi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap moderat seseorang dalam beragama. Rekomendasi kebijakan yang peneliti usulkan dalam studi ini adalah, negara perlu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, jika ingin menaikkan level sikap moderat dari masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks ini, sistem ekonomi Pancasila bisa mengambil peran dalam permasalahan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta memoderasi dalam kehidupan beragama.

## **Referensi**

- Agussalim\*, A., Yani, A., Suryanti, N., & Suaeb, S. (2023). History and Implementation of Pancasila in Economic Education in Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29078>
- APRIANTO, N. E. K. (2018). KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Ardiansyah, Surya, I., & Budiman. (2019). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2).
- Billyam, L., Arta, N., Ayu, S., Cindy, P., Friska, S., & Krista, S. (2018). Kajian Mengenai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa. *Pancasila*, 1(1).

- Direja, S., & Paramitasari, N. (2022). PENGARUH KETIDAKSETARAAN GENDER PADA PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(1). <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i1.5063>
- Elvina Septiani, Y. P. S. (2022). Penerapan Sistem Ekonomi di Indonesia. *Pusdansi*, 2(1).
- Fadilla, A. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.46>
- Febriani, A., & M Fauzi, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Daring Bagi Pendidikan Konseling Dalam Meningkatkan Mutu Peserta Didik Di SMAN 1 Mejayan. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2). <https://doi.org/10.33084/suluh.v6i2.2461>
- Fitriani, F., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Karakteristik Kemiskinan pada Keluarga Orang Tua Tunggal di Kabupaten Jember. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3).
- Hutabarat, D. T. H., Sutta, R. R. A., Wardana, W. H., Fadila, Z. N., Sapahira, P., & Tanjung, R. (2022). MEMAHAMI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI Pandangan Hidup IDEOLOGI & DASAR NEGARA. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)*, 1(2). <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.72>
- Khusaini, K., Hactuconsina, H., & Sabur, A. (2020). INCOME AND EDUCATION INEQUALITY IN BANTEN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i2.3861>
- Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(3).
- Maisaroh, S., & Rohman, A. (2022). Analisis Dampak Pendapatan Pasca Pembangunan Suramadu Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Sekitar Pelabuhan Kamal). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & ...*, 1(1).
- Mandey, D. R., Engka, D. S. M., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1).
- Mardiansah, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.38035/jsmd.v1i1.20>
- Mardikanto. (2019). Panduan pelaksanaan gerakan satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa lebih sejahtera -. *Jurnal Ekonomi*.
- Mohammad Maulana Iqbal. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2). <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.49795>
- Nafisah, S. (2023). *Makna pancasila sebagai pandangan hidup, ketahui isi dari kelima butirnya*. Bpip.Go.Id.
- Nugraha, Y. A., Samian, S., & Riantoputra, C. D. (2020). Antecedent leader endorsement: Perspektif teori identitas sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3). <https://doi.org/10.7454/jps.2020.22>

- Nugroho, T. (2011). Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade. *Paper. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, November 1965.*
- Nurus, R., & Harianto, S. (2023). UPACARA ADAT GREBEG PANCASILA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAN NILAI PANCASILA. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 29(2)*. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.101>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Dwi Purnomo, S., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. *FORUM EKONOMI, 24(2)*. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Pattipeilohy, L., Saingo, Y. A., Kristen, A., & Kupang, N. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(10)*.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 5(1)*. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Putri Anita Rahman, Firman, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 3(6)*.
- Rahardjo, D. (2014). Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu. *Pustek UGM.*
- Rahardjo, M. D. (2016). Demokrasi ekonomi dalam alam liberalisasi ekonomi. *Economic Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760>
- Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 16(1)*. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596>
- Sabar, W., Iwang, B., & Maisar, M. (2022). Revealing poverty in South Sulawesi with several interrelated development indicators. *SOROT, 17(3)*. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.3.129-137>
- Saloom, G. (2012). Meninggalkan Jalan Teror: Perspektif Teori Identitas Sosial. In *Isu-Isu Mutakhir Penelitian Psikologi Sosial*.
- Saputra, B. E. (2021). Konflik jemaat dan identitas sosial Shema dalam 1 Korintus 12. *KURIOS, 7(2)*. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.272>
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007 - 2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(2)*. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36>
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA: ANALISIS INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN. *Jurnal Hexagro, 4(1)*. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Setiani, N., Wawan Hermawan, & Ahmad Komaruzaman. (2023). Pengujian Peran Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2470>

- Sihidi, I. T. (2020). Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 0(0).
- Suhardin, Y. (2023). KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Yanto, D. (2016). PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. *ITTIHAD*, 14(25). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.860>
- Zahara, S., Baihaqi, & Paisal, J. (2023). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Al-Ukhwah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1).